

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Anton Suyatno, 2018, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Prenamedia, Depok.
- Darwis Anatami, 2021, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, Deepublish Publisher, Yogyakarta
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika.
- Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet.2, Bayumedia Publishing, Malang.
- Krista yitawati, Pujiono, Adi Sulistyono, 2022, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Penerbit Deepublish Digital, Yogyakarta.
- M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Paraktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Premada Media, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Sunarmi, 2017, *Hukum Kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, Kencana, Jakarta.

Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta.

Syamsul Efendi, 2024, *Hukum Perikatan*, Literasi Nusantara Abadi Group, Malang.

Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Krista Yitawati, Pujiyono, 2012, Adi Sulistyono, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Budi Utama, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

C. Jurnal

Aditya Tjokorda ANGUS Candra, 2021, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*”, Dharmasiswa, Vol. 1 No. 3, 2021.

Akhdan Adityo Latri dan Muthia Sakti, 2025, “*Ketidakseimbangan Aset Dan Utang Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk*”, Jurnal USM Law Review, Vol 8 No. 3, 2025.

Aziz Rahimy, 2025, “*Analisis Ratio Decidendi Hakim Terhadap Standar Pembuktian Sederhana Dalam Pembatalan Homologasi*”, Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, Vol . 3, No. 2, 2025.

Bernadetha Aurelia Oktavia, Yudho Taruno Muryanto, 2020, “*Perlindungan*

Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Harta (Boedel) Pailit Terhadap Sita Perkara Pidana”, Jurnal Privat Law, Vol. VII No. 1, 2020.

Darell Tri Jaya, Ida Kurnia, 2024, “*Tinjauan Yuridis Eksistensi Putusan Homologasi Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 4, 2024.

Dicky Silaban, Leontua Diagusti, Leonardus Adven, 2023, “*Pembatalan Homologasi Perkara Permohonan PKPU Koperasi Simpan Pinjam Intidana Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*”, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 6. 2023.

Dinda Ayu, Lukmanul Hakim dan Aprinisa, 2024, “*Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Sengketa Kepailitan (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Nomor 845K/Pdt.Sus-Pailit/2022)*”, Jurnal Rectum, Vol. 6 No. 3, 2024.

Francois Geny Ritonga, Lonna Yohanes Lengkong, 2024, “*Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor Yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian*”, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 10, No. 1, 2024.

Moulyta, Queena, Alira Ayu Anggraini, 2026, “*Kepastian Hukum Penerapan Asas Audi et Alteram Partem Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Elektronik (E-Court)*”, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vo; 5, No. 2, 2026

Nanda Dwi Ardhia, et al., 2024, “*The Debtor's Juridical Analysis of Bankruptcy Decisions as A Consequence of Homologation Violations in Suspension of Payment (The case study decision numbers 20/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg, jo. Numbers 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Smg)*”, International Journal of Law, Public Administration and Social Studies, Vol. 1 No. 2, 2024.

Putri Rahmawati, Wardani Rizkianti, 2023, “*Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan Di Inonesia*”, Jurnal Yuridis Vol. 10 No. 2, 2023.

Ruswati, 2022, “*Eksistensi Sita Umum Kepailitan Terhadap Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit*”, Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol 2, No, 1, 2022.

Sabina Rezqita Dwi Cahya, Deviana Yunitasari, Pupung Faisal, 2025, “*Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Pasca Pembatalan Homologasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol 2 No. 4, 2025.

Siti Hapsah Isfardiyana, 2016, “*Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana*

Dalam Pemberesan Harta Pailit”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 3, 2016.

Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, 2014.

Vincent Stanly, 2022, “Kedudukan Kreditur Konkuren Yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Putusan Nomor: 02/pdt.sus-pembatalan perdamaian/2020/pn.niaga.jkt.pst jo.putusan mahkamahagung nomor: 963 k/pdt.sus-pailit/2020)”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5 No. 2, 2022.

Yustika Arbinna, 2023, “Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Studi Kasus 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/Pn Niaga Mdn Jo Nomor : 10/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn Niaga Mdn”, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 1, 2023.

Zahra Athirah, Heru Sugiyono, 2023, “Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi dalam Perkara Kepailitan”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No. 3, 2023.

D. Website

Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, Asas-Asas Putusan Hakim, [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama](#) , diakses pada tanggal 28 April 2026.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit> diakses pada 15 Juli 2026.

